

# RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK

Aulivia Harindi Nur Azzahra, Raisha Nurul Riza

Universitas Brawijaya

Email: : [auliviaazzahra@student.ub.ac.id](mailto:auliviaazzahra@student.ub.ac.id) [raishanurulriza@student.ub.ac.id](mailto:raishanurulriza@student.ub.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji representasi kekuasaan dalam pemberitaan media terkait Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) melalui pendekatan Analisis Wacana kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Fokus utama dalam penelitian adalah bagaimana media dapat membingkai isu-isu politik yang akan menjadi pro dan kontra di ranah publik serta representasi mengenai relasi kuasa antara pemerintah dan militer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik simak-baca pada artikel berita dari media daring yang membahas RUU TNI. Melalui model tiga dimensi Van Dijk (kognisi sosial, konteks sosial, dan teks yang terdiri atas struktur makro, mikro, dan superstruktur) ditemukan bahwa wacana media cenderung memperlihatkan keberpihakan mengenai upaya militer untuk memperluas peran di ranah sipil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media tidak hanya memiliki fungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk ideologis yang dapat memproduksi atau menantang struktur kekuasaan yang ada. Dengan demikian, representasi RUU TNI dalam media dapat menjadi fokus makna kekuasaan yang penting untuk dikritisi dalam konteks demokrasi dan supremasi sipil atas militer.

**Kata Kunci:** Media, RUU TNI, Representasi kekuasaan, Analisis Wacana Kritis, Van Dijk.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the representation of power in media coverage related to the Draft Law on the Indonesian National Army (RUU TNI) through the Critical Discourse Analysis (AWK) approach developed by Teun A. van Dijk. The main focus of the study is how the media can frame political issues that will be pros and cons in the public sphere as well as the representation of the power relations between the government and the military. This study uses a qualitative method with a reading-listening technique in news articles from online media that discuss the RUU TNI. Through Van Dijk's three-dimensional model (social cognition, social context, and text consisting of macro, micro, and superstructure structures), it was found that media discourse tends to show bias regarding the military's efforts to expand its role in the civilian sphere. The results of this study indicate that the media not only functions as a means of conveying information, but also as an ideological form that can produce or challenge existing power structures. Thus, the representation of the RUU TNI in the media can be a focus of the meaning of power that is important to criticize in the context of democracy and civilian supremacy over the military.*

**Keywords:** Media, TNI Bill, Representation of power, Critical Discourse Analysis, Van Dijk.

## PENDAHULUAN

Kekuasaan sejak zaman Yunani Kuno disebut sebagai unsur utama dalam politik. (Habbodin & Firdaus, 2022) dalam bukunya menyebutkan bahwa kekuasaan dapat menggiurkan karena apabila seseorang memiliki kekuasaan maka orang tersebut akan berpengaruh. Lalu mengapa kekuasaan sangat identik dengan ranah politik juga disebutkan oleh (Habbodin & Firdaus, 2022) karena pada dasarnya kekuasaan adalah

konsep dasar dalam ranah politik. Kemudian (Habbodin & Firdaus, 2022) mengutip beberapa pendapat ahli mengenai arti kekuasaan sebagai kekuatan dan pengaruh. Makna kekuasaan sebagai kekuatan ialah bagaimana cara seseorang dapat mempengaruhi individu atau kelompok lain dengan tujuan tertentu. Sementara itu pendapat dari Ossip K. Flechtheim dikutip oleh (Habbodin & Firdaus, 2022) menyebutkan bahwa kekuasaan ialah

kemampuan seseorang dalam menghasilkan hubungan-hubungan serta proses untuk sebuah tujuan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Pendapat lainnya datang dari JJA Van Doorn yang menyebutkan bahwa adanya kekuasaan ialah untuk membatasi pilihan bagi individu atau sekelompok orang. Dari beberapa pendapat di atas dapat disebut bahwa kekuasaan sebagai kekuatan bertujuan untuk mencapai tujuan dari yang memegang kekuasaan tersebut dan kekuasaan dapat membatasi ruang gerak individu atau sekelompok orang. Kemudian kekuasaan sebagai pengaruh artinya adalah bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi tingkah laku individu atau sekelompok orang baik dengan paksaan atau bujukan. Beberapa pendapat ahli yang dikutip oleh (Habbodin & Firdaus, 2022) menyebutkan bahwa kekuasaan dapat mempengaruhi suatu kebijakan, disebut oleh Robert P. Clarck. Pendapat lainnya disebutkan oleh Soejono Soekanto bahwa kekuasaan dapat mempengaruhi pihak lain untuk menuruti kehendak atau kemauan dari pemegang kekuasaan. Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa selain kekuasaan dapat menjadi kekuatan bagi pemegangnya, kekuasaan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk mengikuti kemauan dari pemegang kekuasaan tersebut.

Beberapa bulan terakhir rakyat Indonesia mencekam pemerintah hingga demo di depan gedung DPR-RI untuk mengkritisi kebijakan yang dibuat secara mendadak dan tanpa adanya transparansi. RUU TNI yang menjadi subjek pengkritisan rakyat Indonesia kali ini dianggap akan menghadirkan kembalinya dwi fungsi abri, ketakutan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia tidak sebatas ketakutan sesaat melainkan berdasarkan sejarah yang telah tercatat pada tahun 1966-1998 dimana kekuasaan abri tidak hanya pada ranah pertahanan-keamanan melainkan sosial-politik. Beberapa kekhawatiran rakyat Indonesia akan revisi UU TNI ini disebut oleh media berita metro tv yang berjudul “7 Sorotan Kontroversial dari Pengesahan RUU TNI: Komnas HAM hingga Dwifungsi” yang salah satunya penolakan dari komnas HAM yang menyebutkan untuk

menunda pengesahan RUU TNI karena ditakutkan akan melanggar hak asasi manusia namun DPR tetap ingin melanjutkan proses pengesahan RUU TNI. Alasan lainnya mengapa rakyat menentang keras adanya revisi UU TNI ini adalah ketidaksesuaiannya dengan Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wewenang TNI hanya sebagai bentuk pertahanan- keamanan negara tanpa terlibat dalam politik praktis. Karena adanya revisi UU TNI membuat rakyat Indonesia beranggapan akan adanya perluasan ranah TNI hingga ke politik dan juga tidak ada kejelasan bagaimana mekanisme peralihan status TNI setelah pengesahan RUU TNI tersebut. Maka dari itu kritik yang memuncak dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara Undang-Undang yang ada dan Undang-Undang yang telah direvisi tersebut. Dalam kasus RUU TNI ini ramai diperbincangkan dalam media berita.

Media berita merupakan media massa yang berfungsi menyampaikan informasi kepada khalayak umum melalui berbagai saluran, seperti media cetak, siaran, dan platform digital. Secara umum, posisi media massa dalam mengemas sebuah konflik menjadi berita memiliki peranan yang signifikan. Melalui produk jurnalistik, seorang wartawan berpotensi meredakan atau justru memperbesar konflik yang tengah berkembang di masyarakat. Menurut (Habibie, 2018) menyatakan bahwa media massa cenderung meliputi konflik dari sudut pandang yang bersifat permukaan, yaitu dengan menonjolkan aspek perilaku kekerasan. Pemberitaan yang bersifat sensasional dapat menampilkan nuansa yang dramatis dan disajikan sebagai laporan utama. Namun, pada kenyataannya pemberitaan konflik sering kali tidak merepresentasikan seluruh fakta yang terjadi di lapangan. Banyak berita yang justru menggiring opini publik, baik secara positif maupun negatif. Misalnya, pemberitaan terkait revisi RUU TNI yang menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Salah satu media yang mengangkat isu ini adalah Metro TV melalui narasi yang berjudul “7 Sorotan Kontroversial dari Pengesahan RUU TNI: Komnas HAM hingga Dwifungsi.” Dalam

laporan tersebut, metro tv menarasikan situasi rapat tertutup DPR terkait pengesahan Undang-Undang TNI, serta mengangkat fakta-fakta yang muncul langsung dari proses tersebut. Pada narasi berita dapat berkaitan dengan analisis wacana, sehingga dalam konteks analisis wacana kritis dapat dikaji lebih lanjut menggunakan teori van Dijk yang menekankan pada struktur teks, konteks sosial, serta kekuasaan dan ideologi yang melekat dalam wacana kritis.

Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan kategori pendekatan interdisipliner dalam mengkaji teks dan praktik diskursif dengan berkaitan mengenai struktur kekuasaan, ideologi, dan sosial. Menurut Van Dijk dalam (Halwati, 2016) mengemukakan bahwa penelitian atas wacana tidak cukup berdasarkan pada analisis teks semata, karena suatu teks dari hasil praktek produksi harus juga diamati. Maka teks harus dilihat dengan bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks terbentuk secara beragam dan berbeda dengan teks yang lain. Pada teori van Dijk memiliki beberapa karakteristik yang dikembangkan dengan kolaborasi elemen-elemen wacana, sehingga dapat digunakan dan dipakai secara praktis. Model dimensi teori van Dijk menggambarkan tiga dimensi, yaitu teks, konteks, dan kognisi sosial. Analisis van Dijk ini memiliki inti sebagai menggabungkan ketiga dimensi wacana teks ke dalam satu kesatuan analisis. Dimensi teks yang diteliti adalah sebuah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang digunakan sebagai menegaskan suatu tema tertentu pada bacaan teks. Level kognisi yang dihadirkan dalam teori van Dijk mengenai bagaimana teks iklan yang ditampilkan pada media sosial, sehingga dapat mempengaruhi penonton dalam penjualan produk. Teori van Dijk melihat suatu teks atas berapa tingkatan struktur yang pada masing-masing struktur saling mendukung. Van Dijk membaginya ke dalam tingkatan, yaitu struktur makro, struktur superstruktur, serta struktur mikro.

Penelitian jenis ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh (Oktiaputri, 2023) yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Terhadap Berita Online Gaduh Peduli Lindungi Dituding Melanggar Hak Asasi Manusia, Ada Apa?” membahas mengenai setiap dimensi teks dalam model yang digunakan dapat memuat berbagai elemen penting, antara lain koherensi, penyangkalan, struktur kalimat, penggunaan kata ganti, latar, rincian informasi, pilihan leksikal, serta aspek grafis. Dimensi-dimensi ini secara keseluruhan menunjukkan isu utama yang disajikan secara eksplisit, disertai bukti berupa sanggahan dari berbagai pihak terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Berdasarkan elemen kognisi sosial dan konteks sosial, berita yang dipublikasikan melalui situs resmi nasional Tempo.co ini menunjukkan keberpihakan jurnalis terhadap pemerintah dengan menyajikan bukti yang memperkuat klaim bahwa tuduhan pelanggaran HAM oleh aplikasi tersebut tidak berdasar. Selain itu, narasi dalam berita tersebut tidak memuat opini pribadi yang bersifat provokatif atau kontroversial. Perubahan sosial yang terjadi selama masa pandemi turut memunculkan kebiasaan baru, termasuk perubahan perilaku sosial masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori van Dijk tidak hanya menitik beratkan pada analisis struktur teks saja, melainkan juga memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakangi wacana yang disampaikan.

Penelitian sebelumnya terkait analisis wacana di media sosial juga diteliti oleh (Fitriana, 2019) meneliti berita online menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk pada artikel berjudul “Analisis Wacana Kritis Berita Online Kasus Penipuan Travel Umrah (Model Teun A. Van Dijk)”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis berita online tentang kasus penipuan travel umrah menggunakan lima berita yang berbeda. Pada kelima berita tersebut peneliti masing-masing menemukan penggunaan struktur wacana berupa struktur makro, struktur mikro, dan superstruktur. Dalam struktur mikro sendiri peneliti menemukan berbagai

elemen, seperti semantik (latar, detail, maksud, praanggapan), sintaksis (bentuk, kalimat, koherensi, kata ganti), stilistik (leksikon), dan retorik (grafis, metafora, ekspresi). Peneliti menyatakan kebaruan dari penelitian tersebut adalah menggunakan lima berita yang diterbitkan oleh beberapa penerbit, seperti *kompas.com*, *detik.news.com*, *metrotvnews*, dan *sindo.com*. Meskipun ada perbedaan penerbit berita online tetapi fokus penelitian tersebut adalah pada topik penipuan travel umroh.

Adapun permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) bagaimana struktur teks berita RUU TNI oleh Metro.TV kajian AWK van Dijk, dan (2) bagaimana karakteristik kekuasaan pemerintah dalam berita RUU TNI kajian AWK van Dijk. Sesuai dengan penjabaran dan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul, “RUU TNI dalam Sorotan Media: Representasi Kekuasaan Analisis Wacana Kritis Teori Van Dijk.”

## METODE

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Menurut (Nasution, 2023) metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data, tujuan, serta kegunaan tertentu pada penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik simak-baca. Metode kualitatif ialah metode yang digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian menggunakan deskripsi, seperti kata, kalimat, narasi, hingga gambar. Disebutkan oleh (Alaslan et al., 2023) bahwa metode kualitatif menggunakan teori sebagai penghubung dalam penelitian agar data temuan dapat diuji tidak hanya berdasarkan pengamatan melainkan terdapat dasar dari temuan tersebut. Sementara teknik simak-baca dilakukan dengan cara menyimak, membaca, dan menganalisis isi berita dari media *online* Metro.TV untuk mengidentifikasi struktur, pola, dan makna pada teks berita tersebut. Selain itu, untuk

menganalisis data yang ditemukan peneliti menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk dengan mengkaji tiga dimensi yang dikembangkan oleh Van Dijk.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat hingga paragraf artikel berita yang mengandung tiga dimensi model Analisis Wacana Kritis yang dikemukakan oleh Teun A. Van Dijk. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dapat diperoleh dari dua artikel berita online, yakni berita pertama yang berjudul “7 Sorotan Kontroversial dari Pengesahan RUU TNI: Komnas HAM hingga Dwifungsi”, yang diterbitkan oleh *metro.tv* pada tanggal 20 Maret 2025, serta berita kedua berjudul “RUU TNI Harus Ditandatangani Prabowo Mendatang”, yang juga dimuat di *metro.tv* pada 11 April 2025. Kedua artikel tersebut dianalisis berdasarkan dimensi dalam model van Dijk, yaitu struktur makro, struktur mikro, dan superstruktur. Sementara itu, sumber sekunder mencakup referensi dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumentasi, penelitian terdahulu yang relevan. Mengacu pada pendapat (Ambo & Ardianto, 2017), proses analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian isi atau analisis isi teks media. Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk memahami keseluruhan konten dalam suatu teks, baik berupa teks berita, iklan, surat, maupun jenis teks lainnya. Data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diidentifikasi dan dianalisis, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan kategori yang merujuk pada unsur-unsur teks dalam teori analisis wacana kritis van Dijk. Hasil dari proses analisis data dari penelitian ini sajikan dalam bentuk tabel, sedangkan untuk pembahasannya diuraikan dalam bentuk deskripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil analisis terhadap teks berita *online* “7 Sorotan Kontroversial dari Pengesahan RUU TNI: Komnas HAM hingga Dwifungsi,” dan “

RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
**AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA**

RUU TNI Harus Ditandatangani Prabowo Sebelum 20 April Mendatang” dengan menggunakan analisis wacana model Teun A. van Dijk.

### **Struktur Makro**

Struktur makro merujuk pada makna yang menyeluruh dari suatu teks yang dapat dipahami melalui identifikasi topik utama atau gagasan pokok yang diusung dalam keseluruhan isi wacana (Pratiwi et al., 2020). Tema merupakan suatu gagasan utama yang mendasari sebuah tulisan.

#### **Headline Berita Pertama**

Berdasarkan analisis struktur makro pada teks berita pertama “7 Sorotan Kontroversial dari Pengesahan RUU TNI: Komnas HAM hingga Dwifungsi”, ditemukan bahwa gagasan utama dalam berita *online* tersebut dapat berkaitan dengan sudut pandang pemerintah yang memiliki sejumlah isu krusial dalam pengesahan RUU TNI yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan pemerintahan, serta RUU TNI ini juga menjadi sudut pandang publik yang pengesahan RUU TNI minimnya transparansi. Dengan demikian, pengesahan RUU TNI menjadi momen penting dalam dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia, polemik yang terjadi dapat menarik perhatian publik serta pengamat kebijakan. Maka struktur makro dari berita RUU TNI ini memberikan pandangan mengenai dua sisi dari pemerintah dan publik, mulai dari revisi Undang-Undang hingga pengesahan RUU TNI yang dilakukan pemerintah secara tertutup dan minimnya transparansi dan pada pandangan publik yang menilai bahwa kinerja pemerintah sangat tidak adil mengenai minimnya transparansi dan opini-opini mengenai peralihan masa militer ke ranah sipil.

#### **Headline Berita Kedua**

Berdasarkan analisis struktur makro pada teks berita kedua yang berjudul “RUU TNI Harus Ditandatangani Prabowo Mendatang”, ditemukan bahwa gagasan utama yang diangkat dalam berita tersebut terdapat

sudut pandang pemerintah mengenai kekuasaan jabatan presiden sehingga dapat berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menandatangani dan mengesahkan RUU TNI sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Maka struktur makro dari berita RUU TNI ini memberikan pandangan bahwa dalam analisis kekuasaan pemerintah lebih unggul serta tidak dapat diganggu gugat secara resmi mengenai perUndang-Undangan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Humaira, 2018) yang menyatakan bahwa analisis struktur makro dalam studi wacana kritis dimulai dari pencarian makna, topik, atau tema global. Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh (Oktia Putri, 2023) yang juga meneliti mengenai unsur makro dari sebuah berita *online* yang berjudul “Gaduh Peduli Lindungi Dituding Melanggar Hak Asasi Manusia, Ada Apa?”.

### **Struktur Mikro**

Struktur mikro dalam kajian analisis wacana kritis model Van Dijk mengkaji bagaimana teks wacana dianalisis dengan pendekatan linguistik. Disebutkan oleh (Fitriana, 2019) bahwa struktur mikro pada kajian Van Dijk adalah melihat struktur teks melalui unsur terkecil teks, seperti kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Dalam dimensi struktur mikro model Van Dijk terdapat empat kajian yang diteliti, yaitu semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) semantik ialah ilmu yang mengkaji makna dalam susunan kata dan kalimat. Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *sema* yang artinya tanda atau lambang. Disebutkan oleh (Hayati et al., 2018) bahwa semantik ialah istilah dalam linguistik yang mengkaji makna-makna dalam satuan yang membentuk bahasa. (Hayati et al., 2018) yang mengutip pendapat Tarigan bahwa semantik tidak hanya mengkaji makna-makna yang membentuk bahasa melainkan bagaimana makna tersebut dapat berkembang dan

RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA

berubah karena pengaruh dari manusia hingga lingkungan. Semantik dalam kajian Van Dijk pada analisis wacana kritis memiliki beberapa kajian, yaitu latar, detail, maksud, praanggapan, dan nominalisasi. Berikut data penelitiannya:

**Latar**

**Data 1**

*Dalam waktu singkat, RUU TNI langsung disahkan setelah mayoritas anggota DPR menyatakan persetujuan.*

**Data 2**

*Artinya, Prabowo sebagai Presiden harus menandatangani RUU TNI yang sudah disahkan DPR sebelum 20 April 2025, terhitung setelah pengesahannya pada 20 Maret lalu.*

Kedua kutipan berita tersebut menyebutkan bahwa RUU TNI yang direvisi telah disetujui oleh anggota DPR dan meskipun Presiden Prabowo belum menandatangani Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan bahwa RUU TNI telah disahkan karena mengikuti aturan yang tertulis pada Undang-Undang Pasal 73 ayat (3) tahun 2022.

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana kekuasaan dapat membentuk seseorang atau kelompok dengan arahan dari yang memegang kekuasaan. Konsep kekuasaan ialah kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Teks wacana tersebut dapat menjadi kontrol teks itu sendiri, seperti yang disebutkan oleh Van Dijk dalam (Yasa, 2021) bahwa ideologi seseorang akan mempengaruhi pola pikir sosial dalam memahami wacana tersebut. Kedua data di atas menyatakan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh DPR membuat masyarakat sosial tidak memiliki kesempatan untuk merespon karena tidak adanya transparansi akan hal tersebut.

**Detil**

**Data 1**

*Hanya sehari sebelum paripurna, pemerintah*

*h menggelar rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.*

**Data 2**

*Meski DPR berjanji bahwa draf revisi akan segera diunggah di laman resmi, hingga berita ini ditulis, masyarakat masih kesulitan mengakses dokumen finalnya.*

**Data 3**

*Padahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).*

Ketiga kutipan berita tersebut menyatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI dilakukan satu hari sebelum paripurna secara tertutup dan draf revisian yang belum diunggah kepada publik. Kutipan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai alasan DPR membuat rapat secara tertutup untuk merevisi Undang-Undang TNI dan mengapa hingga berita tersebut dirilis masih belum ada kejelasan mengenai draf tersebut.

Van Dijk memandang bahwa detil dalam wacana dapat mempertanyakan apakah seorang penulis mengontrol tulisannya, seperti apakah penulis memberikan informasi mendalam atau sedikit, (Yasa, 2021). Dari ketiga kutipan tersebut penulis memberikan informasi secara mendalam mengenai rencana DPR yang berjanji bahwa draf revisi akan diunggah namun hingga berita tersebut rilis, draf revisi belum muncul ke permukaan. Selain itu penulis juga memberikan informasi mengenai rapat tertutup yang dilakukan oleh DPR untuk merevisi Undang-Undang tersebut hingga sudah disahkan. **Maksud**

**Data 1**

*7 Sorotan Kontroversial dari Pengesahan RUU TNI: Komnas HAM hingga Dwifungsi.*

**Data 2**

RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
**AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA**

*RUU TNI Harus Ditandatangani  
Prabowo sebelum 20 April  
Mendatang.*

Kedua kutipan tersebut merupakan judul dari berita yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua berita tersebut sama-sama memiliki fokus, yaitu RUU TNI. Pada berita pertama membicarakan mengenai tujuh hal-hal dalam perevisian Undang-Undang TNI yang menjadi pembahasan kontroversial. Sementara pada berita kedua membicarakan bahwa Presiden Prabowo belum menandatangani RUU TNI tersebut dan terdapat batasan waktu baginya untuk menandatangani revisi Undang-Undang TNI tersebut.

Menurut Van Dijk dalam (Yasa, 2021) dalam teks wacana, konteks harus memiliki aspek situasional dan aspek sosial dalam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pendapat tersebut selaras dengan kedua judul berita tersebut dimana berita pertama memfokuskan kepada pembaca bahwa selain masyarakat melakukan aksi demo kepada pemerintah, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan kontroversial. Kemudian pada judul berita kedua memfokuskan pada RUU TNI yang belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo dengan isi berita yang menyebutkan bahwa tidak ada niatan untuk mengembalikan dwifungsi TNI.

**Praanggapan**

Data 1

*Salah satu sorotan utama adalah  
kemungkinan kembalinya peran  
ganda TNI dalam ranah sipil.*

Data 2

*"Panglima TNI satu tahun ganti,  
KSAD (Kepala Staf Angkatan  
Darat) satu tahun ganti, karena  
usianya habis. Waktu dia untuk  
karirnya, begitu mau dipakai, usia  
habis. Di mana kita bisa punya  
organisasi yang pemimpinnya ganti  
setiap tahun?" ujar Prabowo.*

Kedua kutipan tersebut menyebutkan hal yang berbeda meskipun fokusnya RUU TNI. Pada data pertama

disebutkan bahwa adanya ketakutan kembalinya dwifungsi TNI dalam ranah sipil namun pada data kedua disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo bahwa revisi Undang-Undang TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi TNI melainkan hanya memperpanjang usia pensiun TNI dengan panglima tertinggi. Dimana pada data kedua membantah praanggapan yang ada pada berita pertama.

Berdasarkan teori Van Dijk akan kajian praanggapan dalam (Yasa, 2021) memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari teks wacana yang ada. Pertanyaan tersebut menampilkan kepercayaan pembaca atau masyarakat untuk lebih memahami dan mempercayai berita yang menurut pembaca lebih meyakini. Tentu hal tersebut kembali lagi kepada konteks yang ada dalam teks wacana tersebut.

**Nominalisasi**

Data 1

*Dalam waktu singkat, RUU TNI  
langsung disahkan setelah  
mayoritas anggota DPR  
menyatakan persetujuan.*

Data 2

*Serempak, peserta sidang  
menjawab, "Setuju," diikuti  
ketukan palu tanda pengesahan.*

Data 3

*Padahal, RUU TNI sudah  
disahkan menjadi undang-undang  
oleh DPR dalam rapat paripurna  
pada Kamis (20/3/2025).*

Ketiga kutipan tersebut menyebutkan siapa saja yang ikut andil dalam revisi Undang-Undang TNI tersebut, salah satunya adalah anggota DPR. Meskipun tidak disebutkan siapa saja yang setuju dalam merevisi Undang-Undang TNI tersebut tetapi kata 'mayoritas' menyebutkan bahwa semua anggota DPR telah menyetujui RUU TNI tersebut.

Pendapat mengenai nominalisasi datang dari (Yasa, 2021) yang mengutip pendapat Van Dijk bahwa nominalisasi

RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA

digunakan untuk menghapus seseorang atau tindakan dalam teks wacana.

Namun dalam hal ini, kedua berita tersebut berada di posisi antara karena tidak secara gamblang menyebutkan siapa saja anggota DPR yang menyetujui RUU TNI tersebut namun juga menyatakan bahwa mayoritas anggota DPR telah menyetujui RUU TNI yang dilakukan secara tertutup itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sintaksis ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji susunan kalimat serta bagian-bagiannya, seperti tata kalimat dan unsur bahasa yang membentuk kalimat itu sendiri. Pendapat lain datang dari (Umam et al., 2023) dalam bukunya yang menyebutkan sintaksis ialah cabang ilmu linguistik yang fokus pembicaraannya adalah hubungan antarkata dalam tuturan, seperti frasa, klausa, dan kalimat. Dalam teori analisis wacana kritis Van Dijk terdapat beberapa kajian, yaitu bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Berikut datanya:

**Bentuk Kalimat**

Data 1

*DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam rapat paripurna, Kamis, 20 Maret 2025.*

Data 2

*Padaahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).*

Data 3

*Dalam waktu singkat, RUU TNI langsung disahkan setelah mayoritas anggota DPR menyatakan persetujuan. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang dengan menanyakan kesepakatan anggota.*

Data 4

*Presiden Prabowo Subianto diketahui belum menekan atau menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*

*tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).*

Keempat kutipan di atas menyatakan informasi mengenai RUU TNI yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Maret 2025 dan dilakukan secara tertutup satu hari sebelum paripurna. Selain itu kutipan tersebut menyebutkan bahwa meskipun Presiden Prabowo belum menandatangani RUU TNI yang telah dilakukan oleh DPR pada hari Kamis, 20 Maret 2025, RUU TNI telah dianggap sah karena berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UU 13/2022 apabila mayoritas suara telah menyetujui RUU TNI tersebut maka rancangan Undang-Undang telah disahkan.

Bentuk kalimat pada keempat kutipan tersebut adalah informatif karena menyatakan informasi-informasi yang penting dalam teks berita nya. Hal tersebut dikarenakan penulis berita memberikan informasi kapan rapat paripurna dilaksanakan dan mengapa RUU TNI telah disahkan dalam waktu singkat meski Presiden Prabowo belum menandatangani RUU TNI tersebut. Van Dijk dalam (Prihartono & Suharyo, 2022) menyebutkan bahwa bentuk kalimat dalam teks wacana berkaitan dengan bagaimana penutur menyusun serta menata kalimat sesuai dengan keinginannya.

**Koherensi**

Data 1

*Sebuah RUU haruslah ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan agar undang-undang tersebut dapat berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undang dijelaskan Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya.*

Data di atas merupakan salah satu bentuk koherensi yang ada pada berita yang peneliti analisis. Kutipan tersebut menyatakan informasi mengenai Presiden yang harus menandatangani rancangan



RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
**AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA**

Undang- Undang agar Undang-Undang tersebut dapat berlaku. Kemudian kutipan tersebut juga menyertakan bahwa Presiden harus menandatangani rancangan Undang-Undang yang ada dalam rentang waktu selama 30 hari setelah rancangan tersebut dibentuk.

Van Dijk dalam (Prihartono & Suharyo, 2022) menyatakan bahwa koherensi ialah runtutan elemen dalam teks dapat membentuk pernyataan secara terhubung dan logis. Bentuk yang dilihat dalam koherensi sendiri ialah ide, kalimat, hingga paragraf. Menurutnya teks wacana memang memiliki runtutan yang saling terhubung dari awal hingga akhir teks wacana itu sendiri. Pada kutipan tersebut ialah salah satu analisis data dimana koherensi terlihat pada teks berita yang menyertakan pernyataan awal yang logis dan diakhiri secara terhubung dan berdasarkan fakta.

**Kata Ganti**

**Data 1**

*Dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada Minggu (6/4/2025).*

**Data 2**

*Sebab, ia menyorot pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun*

**Data 3**

*Saya sebetulnya mengatakan, ini berapa jenderal harus kita ganti sekarang? Jadi, saya mohon, kalau bisa inti dari RUU TNI sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi," sambungnya.*

Ketiga data tersebut merupakan hasil kutipan dari dua berita berbeda dimana kedua berita tersebut tidak banyak menggunakan kata ganti. Beberapa kata ganti orang ketiga yang digunakan adalah *nya* dan *ia*. Kata ganti tersebut mengungkap relasi kekuasaan. Penulis berita menegaskan kekuasaan yang

dimiliki oleh Presiden Prabowo dalam menyebutkan beberapa hal. Menurut Van Dijk dalam (Prihartono & Suharyo, 2022) Kata ganti digunakan oleh penulis untuk memperlihatkan tokoh atau seseorang yang terlibat dalam teks wacana tersebut baik secara eksplisit atau implisit.

Stilistika ialah ilmu yang mengkaji penggunaan gaya bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) stilistika ialah ilmu penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam karya sastra. Pendapat Van Dijk dalam (Prihartono & Suharyo, 2022) stilistika ialah pemilihan serta penggunaan bahasa oleh penulis atau penutur dengan maksud untuk menyampaikan gagasannya agar dapat diterima oleh pembaca atau mitra tutur. Berikut datanya:

**Data 1**

*Meski DPR bejani bahwa draf revisi akan segera diunggah di laman resmi, hingga berita ini ditulis, masyarakat masih kesulitan mengakses dokumen finalnya.*

**Data 2**

*Dengan berbagai kontroversi yang menyertai pengesahan RUU TNI ini, banyak pihak mempertanyakan apakah revisi ini akan memperkuat reformasi TNI atau justru membuka peluang intervensi militer dalam ranah sipil.*

Data pertama memiliki makna kritis tersirat dimana gaya bahasa yang digunakan oleh penulis memiliki maksud menyindir dengan sangat halus. Kata ‘berjanji’ menjadi poin utama yang ingin diberikan oleh penulis mengenai informasi yang menciptakan keraguan akan janji yang tak kunjung diberikan. Pada data kedua memiliki bentuk pertanyaan retorik dimana penulis menggambarkan nuansa hati-hati namun kritis terhadap tulisannya mengenai ‘kemana arah kebijakan negara sebenarnya?’. Van Dijk dalam (Prihartono & Suharyo, 2022) menyebutkan bahwa penggunaan gaya bahasa oleh penulis dapat mempengaruhi

RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA

pembaca dalam menerima ‘maksud’ atau pesan yang ingin disampaikan.

Retoris pada dasarnya adalah sebuah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena fungsi kalimat retoris ialah untuk menarik perhatian pembaca. Van Dijk dalam (Prihartono & Suharyo, 2022) menyebutkan bahwa retoris dalam analisis wacana kritis berfungsi untuk menarik, mempengaruhi, dan membentuk opini pembaca. Kajian retoris sendiri terdiri atas grafis, ekspresi, dan metafora. Namun pada kedua berita penelitian tidak ditemukan penggunaan metafora oleh penulis. Berikut datanya:

### Grafis

Data 1

*Pengesahan Kilat diTengah  
Protes*

Data 2

*Komnas HAM menolak, DPR jalan  
terus*

Data 3

*Kekhawatiran kembalinya  
dwifungsi TNI*

Data 4

*Rapat tertutup sebelum paripurna*

Data 5

*Penolakan publik dan demonstarsi*

Data 6

*Janji transparasi, draf tak kunjung  
dipublikasikan*

Data 7

*Nasib reformasi TNI  
dipertanyakan*

Ketujuh data tersebut berasal dari berita pertama dimana berita tersebut membuat tujuh poin yang menjadi sorotan kontroversial dalam peristiwa revisi Undang-Undang TNI. Seperti yang disebutkan oleh Van Dijk bahwa penggunaan retoris ialah untuk membentuk

opini pembaca dalam hal ini masyarakat sosial.

Grafik sendiri digunakan untuk membentuk atau memetakan hubungan antara struktur wacana, kognisi, dan konteks sosial. Dari ketujuh data tersebut pembaca dapat mengetahui hal-hal yang menjadi kontroversial dan mengapa hal tersebut menjadi pembicaraan yang layak didiskusikan karena poin-poin tersebut telah memetakan bagian kognisi dan konteks sosial.

### Ekspresi

Data 1

*Banyak pihak mempertanyakan apakah revisi ini akan memperkuat reformasi TNI atau justru membuka peluang intervensi militer dalam ranah sipil. Janji supremasi sipil yang disampaikan DPR masih diuji oleh waktu.*

Data 2

*Presiden Prabowo Subianto diketahui belum menekan atau menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).*

Kedua kutipan tersebut membicarakan bagaimanakah nasib RUU TNI apabila pengesahannya dapat membuka peluang dwifungsi TNI dan informasi bahwa Presiden Prabowo belum menandatangani RUU TNI tersebut. Kedua data tersebut memberikan ekspresi yang melingkupi ideologi, sikap, dan ide penulis. Pilihan kata yang digunakan oleh penulis secara eksplisit untuk mengungkap keresahan masyarakat yang masih bertanya-tanya mengenai RUU TNI tersebut.

### Superstruktur

Superstruktur merujuk pada keseluruhan topik yang terkandung dalam suatu wacana. Dalam konteks ini, superstruktur menekankan pada skema penulisan yang meliputi bagian pendahuluan, isi, dan penutup, sehingga membentuk sebuah teks yang utuh dan koheren (Aini & Widodo, 2018). Dalam

RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
**AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA**

teks berita, terdapat dua jenis skema utama, yakni *summary* dan *story*. Pada skema *summary* sendiri terdiri atas dua elemen penting, yaitu judul dan teras berita (*lead*). Teras berita memiliki peran sentral dalam struktur berita, karena berfungsi sebagai ringkasan umum dari isi berita yang memungkinkan pembaca untuk memahami ide pokok secara cepat dan efisien.

Data 1

Berita berjudul “7 Sorotan Kontroversial dari Pengesahan RUU TNI: Komnas HAM hingga Dwifungsi”, dan teras berita dalam berita tersebut adalah

*“DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI)*

*dalam rapat paripurna, Kamis, 20 Maret 2025. Pengesahan ini menuai berbagai tanggapan, mulai dari janji supremasi sipil hingga kekhawatiran tentang keterlibatan TNI dalam jabatan sipil.”*

Data 2

*Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang dengan menyatakan kesepakatan anggota. Serempak, peserta sidang menjawab “Setuju” diikuti ketukan palu tanda pengesahan.*

*Komnas HAM meminta agar pengesahan ditunda dengan alasan bahwa revisi UU ini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia. Namun, DPR tetap melanjutkan proses tanpa perubahan berarti.*

*Salah satu sorotan utama adalah kemungkinan kembalinya peran ganda TNI dalam ranah sipil.*

*Meski demikian, kritik tetap mengemuka karena aturan ini memperbolehkan perwira aktif*

*menduduki jabatan kementerian atau lembaga sipil tertentu.*

*Hanya sehari sebelum paripurna, pemerintah menggelar rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI. Rapat ini berlangsung selama dua jam ini.*

*Massa aksi menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU TNI.*

*Meski DPR berjanji bahwa draf revisi akan segera diunggah di laman resmi, hingga berita ini ditulis, masyarakat masih kesulitan mengakses dokumen final.*

*Apakah revisi ini akan memperkuat reformasi TNI atau justru membuka peluang intervensi militer dalam ranah sipil. Janji supremasi sipil yang disampaikan DPR masih diuji oleh waktu.*

Berdasarkan uraian diatas, headline pada berita dapat menjelaskan mengenai pengesahan RUU TNI yang memiliki dua sudut pandang, yaitu pandangan pemerintah dan publik. Narasi yang dihadirkan dalam berita dapat memberikan penguat terhadap tata cara pemerintah untuk menangani kasus RUU TNI dan memberikan gambaran kepada publik bahwa terdapat beberapa kegagalan yang dilakukan pemerintah sehingga memberikan nilai kontra bagi publik terhadap pemerintah.

Isi/story merepresentasikan mengenai isi teks yang memuat poin-poin penting dari peristiwa yang diberitakan. Teks tersebut secara ringkas menggambarkan proses pengesahan Undang-Undang TNI yang berlangsung dengan cepat dan memicu kontroversi, serta menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik terkait potensi kembalinya dominasi militer dalam ranah kehidupan sipil. Dalam proses pengesahan tersebut, teridentifikasi bahwa beberapa indikasi kegagalan, antara lain kurangnya transparansi, minimnya

partisipasi publik dalam proses legislasi, pelaksanaan rapat tertutup sebelum paripurna, serta penolakan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kondisi ini dapat memicu respons kritis dari masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Pemberitaan mengenai RUU TNI ini mencerminkan adanya perdebatan antara kepentingan sipil dan militer, sehingga implementasi kebijakan tersebut menjadi perhatian utama bagi masyarakat serta pengamat kebijakan. Maka dapat terlihat bahwa superstruktur dalam berita tersebut memiliki pandangan dari dua sisi yaitu, pada pandangan pemerintahan dan pandangan publik.

Data 3

Berita berjudul *"RUU TNI Harus Ditandatangani Prabowo Mendatang"*, dan teras berita dalam berita tersebut adalah *"Presiden Prabowo Subianto diketahui belum menekan atau menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Padahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/25)."*

*Sebuah RUU haruslah ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan, agar undang-undang tersebut dapat berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan, Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya.*

*Namun meskipun RUU TNI tidak ditandatangani oleh Prabowo setelah 30 hari pengesahannya, RUU TNI masih tetap sah dan wajib diundangkan.*

*Sebelumnya, Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dwifungsi ABRI lewat RUU TNI.*

*Prabowo menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.*

Berdasarkan uraian diatas, headline pada berita dapat menjelaskan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, secara tidak langsung maka dari judul berita yang hadirkan dapat memberikan asumsi bahwa berita tersebut akan menampilkan pro terhadap pemerintah.

Isi/story dalam berita dapat menjelaskan mengenai isi teks yang memuat poin-poin penting dari peristiwa yang diberitakan. Teks tersebut secara ringkas menjelaskan bahwa sebuah RUU TNI harus ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto agar dapat diundangkan dan berlaku secara resmi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 yang berbunyi bahwa Presiden memiliki kewajiban untuk menandatangani RUU TNI dalam jangka waktu 30 hari setelah disahkan oleh DPR. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI melalui RUU TNI. Ia menyatakan bahwa substansi utama dari RUU TNI ini adalah masa perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi TNI. Adapun beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam pemberitaan tersebut meliputi: (1) kewajiban Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan dan menandatangani RUU TNI dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, (2) pernyataan klarifikasi bahwa RUU tersebut tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali peran dwifungsi ABRI, (3) sorotan terhadap dinamika pergantian pimpinan TNI yang dinilai terlalu cepat, (4) penekanan pada tujuan administratif dari perubahan RUU TNI dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem organisasi TNI. Sehingga Presiden

Prabowo menegaskan bahwa revisi

RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
**AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA**

terhadap Undang-Undang TNI ini hanya bersifat teknis yang tidak merombak secara fundamental peran TNI, melainkan bertujuan sebagai memperpanjang usia pensiun guna menghindari proses regenerasi kepemimpinan yang terlalu cepat dalam kurung waktu setiap tahun. Presiden dapat menggunakan kewenangannya dalam proses pengesahan RUU TNI yang telah disetujui oleh DPR, namun hingga kini belum ditandatangani. Maka jika dikaji dalam superstruktur berita tersebut memiliki pandangan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pada Presiden mengenai pengesahan RUU TNI.

### **Kognisi Sosial**

Presiden Prabowo diketahui belum menandatangani RUU TNI meskipun DPR telah menyetujui hal tersebut. Dalam berita kedua, Prabowo mengatakan “Saya mohon, kalau bisa inti dari RUU TNI sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi.” yang menyatakan bahwa RUU TNI tidak mengembalikan dwifungsi TNI sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Namun tetap saja meskipun pernyataan dari Prabowo sedemikian rupa tetap muncul kekhawatiran pada masyarakat yang menggambarkan kecemasan serta keraguan kolektif, seperti pada kutipan “Nasib reformasi TNI dipertanyakan.” dan “Banyak pihak mempertanyakan apakah revisi ini akan memperkuat reformasi TNI atau justru membuka peluang intervensi militer dalam ranah sipil.” apabila dianalisis menggunakan teori Van Dijk maka kedua pernyataan tersebut memunculkan representasi sosial akan militer yang mengembalikan ingatan sejarah pada masa orde baru.

### **Konteks Sosial**

Pengesahan revisi RUU TNI oleh DPR RI menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dengan latar belakang bahwa pengesahan Undang-Undang secara tertutup dan aspirasi publik memperlihatkan adanya kritik terhadap praktik kekuasaan yang dianggap beresiko mengancam nilai-nilai demokrasi dan HAM serta janji transparansi tak kunjung

diunggah sehingga menimbulkan kesulitan masyarakat untuk mengakses dokumen final dari revisi RUU TNI. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat mengenai opini yang dilakukan pemerintahan sekaligus menjadi sorotan publik yang memunculkan perspektif negatif terhadap pemerintahan.

Pernyataan yang datang dari Prabowo pada data RUU20-KNP-B13-K menyatakan adanya penyederhanaan kontroversial yang ada agar masyarakat dapat menerima RUU TNI tersebut dan pernyataan tersebut menjadikan praanggapan untuk meredam kritik bahwasanya RUU TNI hanya mempersoalkan perpanjangan usia pensiun TNI an menggeser topik utama, yaitu dwifungsi TNI.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tidak hanya memiliki fungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk ideologis yang dapat memproduksi atau menantang struktur kekuasaan yang ada. Temuan-temuan yang ada dalam analisis kedua berita menggunakan teori Analisis Wacana Kritis (AWK) model Van Dijk ditemukan struktur teks, yaitu struktur makro, struktur mikro (semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik), superstruktur, kognisi sosial, dan konteks sosial. Ketiga dimensi tersebut membentuk teks dari kedua berita tersebut yang menggambarkan bagaimana RUU TNI dalam media dapat menjadi fokus makna kekuasaan yang penting untuk dikritisi dalam konteks demokrasi dan supremasi sipil atas militer

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, N., & Widodo, P. (2018). Critical Discourse Analysis of the Bombing Attack News: An Analysis of Teun A. van Dijk's Model. *Proceedings of the International Conference of Communication Science Research (ICCSR)* (2018).  
<https://doi.org/10.2991/iccsr-18.2018.49>

**RUU TNI DALAM SOROTAN MEDIA: REPRESENTASI KEKUASAAN ANALISIS  
WACANA KRITIS TEORI VAN DIJK  
AULIVIA HARINDI NUR AZZAHRA, RAISHA NURUL RIZA**

- Alaslan, A., Amane, A. P. O., Suhatri, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., Rustandi, Rahmi, S., Darmadi, & Richway. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/literasi/article/view/951>, 2(1), 32–40
- Ambo, M., & Ardianto, B. E. : (2017). ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF.
- Fitriana, R. A. (2019). ANALISIS WACANA KRITIS BERITA ONLINE KASUS PENIPUAN TRAVEL UMRAH (MODEL TEUN A. VAN DIJK).
- BASINDO : Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pembelajarannya, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.17977/um007v3i12019p044>
- Habbodin, M., & Firdaus, M. (2022). KEKUASAAN DAN KEDAULATAN MEMERINTAH. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta), 3(1), 50–62. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.166>
- Halwati, U. (2016). ANALISIS TEUN A. VAN DIJK DALAM KAJIAN WACANA TEKS DAKWAH DI MEDIA MASSA. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.24090/komunika.v5i1.766>
- Hayati, N., Dwi, ), Chan, M., Rahman, I., Program, ), Bahasa, S. P., Indonesia, S., Ydb, S., Alung, L., & Barat, S. (2018). ANALISIS IDIOM DALAM BERITA KRIMINAL DI SURAT KABAR PADANG EKSPRES (KAJIAN SEMANTIK). <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp>
- Humaira, H. W. (2018). ANALISIS WACANA KRITIS (AWK) MODEL TEUN A. VAN DIJK PADA PEMBERITAAN SURAT KABAR REPUBLIKA. <https://www.researchgate.net/publication/370214785>
- Habibie, D. K. (2018). DWI FUNGSI MEDIA MASSA. In Jurnal Ilmu Komunikasi (Vol. 7, Issue 2).
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Oktiaputri, A. (2023). ANALISIS WACANA KRITIS MODEL VAN DIJK TERHADAP BERITA ONLINE “GADUH PEDULILINDUNGI DITUDING MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA, ADA APA?” Semantik, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i1.p1-20>
- Pratiwi, V. U., Nofrahadi, N., Pendri, A., Komalasari, D., & Sumarlam, S. (2020). News Text on Kompas.com Media of Covid-19 and the Underlying Conspiracy Theory: A Teun Van Dijk’s Critical Discourse Analysis. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(4), 3894–3903. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1455>
- Prihartono, R., & Suharyo. (2022). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk dalam “#DebatKeren Papua-Budiman Sudjatmiko VS Dandhy Laksono” (Kajian Analisis Wacana Kritis) (Vol. 1, Issue 2).
- Umam, K., Supriadi, O., & Suntoko. (2023). Analisis Kelas Kata Dan Frasa Dalam Sintaksis Pada Artikel Di Media Detik.Com Edisi Bulan Juni 2022 Sebagai Rekomendasi Materi Ajar. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(4), 611–621.
- Yasa, I. N. (2021). TEORI ANALISIS WACANA KRITIS. <https://www.researchgate.net/publication/370214785>